



## **EVALUASI PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PERTANIAN KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY**

**Muhammad Sufyan Juliandi Indra Jaya<sup>1</sup>, Lalu Yayan Ardiansyah<sup>2</sup>, Ilham Maulana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Master of Accountancy University of Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Economics and Business Bumigora University, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

\*Correspondences: [jayajgok1234@gmail.com](mailto:jayajgok1234@gmail.com)

### **Abstract**

This article aims to evaluate performance measurement at the Mataram city agricultural service using a value-for-money approach. This research is categorized as qualitative descriptive research, the data in this study were taken from the results of observation and documentation. After obtaining the required data, it is then analyzed to describe accurately, factually, and systematically the facts and the relationship between the phenomena being investigated. In this study, the Mataram City Agriculture Office showed good results in terms of value for money. Of the program activities that have been realized by the Mataram City Agriculture Service in 2019 with an economic level of 95.77%, the efficiency of 97.61%, and effectiveness of 86.82%. Researchers hope that the balance between economic value, efficiency, and effectiveness can be maintained.

**Keywords:** Performance Measurement; Value for Money; Public Sector Accounting

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pengukuran kinerja pada dinas pertanian kota Mataram dengan pendekatan value for money. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diambil dari hasil observasi dan dokumentasi. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan selanjutnya dianalisis untuk menggambarkan secara akurat, faktual, dan sistematis tentang fakta dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini Dinas Pertanian Kota Mataram menunjukkan hasil yang baik jika ditinjau dari segi value for money. Dari aktivitas program yang telah direalisasikan Dinas Pertanian Kota Mataram tahun 2019 dengan tingkat ekonomis sebesar 95,77%, efisiensi sebesar 97,61%, dan efektifitas sebesar 86,82%. Peneliti berharap keseimbangan antara nilai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas ini dapat terjaga.

**Kata Kunci:** Pengukuran Kinerja; Value for Money, Akuntansi Sektor Publik

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik atas program dan aktivitas yang telah dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Akuntabilitas organisasi sektor publik bukan hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan pengelolaan uang publik yang telah dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang yang dikelola tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif yang disebut sebagai konsep *value for money*.<sup>1</sup> Oleh karena itu, akuntansi pada sektor publik membantu organisasi dalam rangka memenuhi kewajiban memenuhi akuntabilitas sebagai organisasi sektor publik. Menurut Jaya juga dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keberanian pelapor di dalam organisasi untuk mengungkapkan kecurangan akan dihadapkan bermacam resiko sehingga diperlukan suatu alat dalam mengukur kinerja organisasi.<sup>2</sup>

Pengukuran kinerja ini sangat diperlukan sebagai alat penilaian dalam akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik sehingga menghasilkan pelayanan publik dengan efektif serta efisien. Menurut Bastian Kinerja merupakan suatu bentuk cerminan perolehan organisasi dalam melaksanakan suatu program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.<sup>3</sup> Dalam hal mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan sektor publik salah satunya adalah dengan menganalisis dalam mencapai target dan realisasi dari penerimaan hingga pengeluaran atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>4</sup> Dalam hal ini sangat diperlukan suatu alat yang andal untuk menunjang analisis pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik. Konsep *value for money* merupakan cara yang digunakan untuk mengukur dengan pendekatan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja dari program dan kegiatan organisasi di sektor publik.

---

<sup>1</sup> Taufik Kurrohman, "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis," *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5, no. 1 (2013): 1–11.

<sup>2</sup> M Jaya, I Handajani, and L Sakti, "Anteseden Intensi Menggunakan Whistleblowing System," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 3 (2022): 511–23, <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2>.

<sup>3</sup> I Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006).

<sup>4</sup> Dika Husni Sanjaya and Maswar Patuh Priyadi, "Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Dan Riset ...* 8 No.12 (2019): 1–16.

*Value for money* juga merupakan inti dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.<sup>5</sup> Jika ditinjau dengan konteks otonomi daerah, *value for money* diperlukan dalam merealisasikan *good governance*. Tujuan dari kegunaan *value for money* merupakan usaha untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya.<sup>6</sup> *Value for money* juga merupakan jembatan dalam mengantarkan pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* seperti pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.<sup>7</sup>

Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik semakin meningkat, dimana departemen dan lembaga negara, serta unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.<sup>8</sup> Dinas Pertanian kota Mataram bergerak dalam program dan pemberdayaan di wilayah pertanian. Kegiatan Dinas Pertanian yakni melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang pertanian sesuai dengan peraturan walikota Mataram nomor 55 tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi dinas pertanian kota Mataram.

Dinas pertanian kota Mataram telah bergabung dengan bidang peternakan dan menyusun kembali perubahan rencana strategis (RENSTRA) pada tahun 2019, realisasi anggaran Dinas Pertanian kota Mataram juga terus menurun tiap tahunnya dari Rp. 19.541.936.764,00- pada tahun 2015 menjadi Rp. 14.387.796.471,00- pada tahun 2018.<sup>9</sup> Kecermatan dari Dinas Pertanian dalam menyusun RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dari sisi anggaran maupun indikator kinerja tentu sangat menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Di sisi lain lahan pertanian yang ada di kota Mataram

---

<sup>5</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (UPP STI YKPN, 2013).

<sup>6</sup> Geoffrey Q.P.S dkk., “Wealth Generation Through Value “,” *Journal of Value Management* 8, no. 1 (2002), <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

<sup>7</sup> Agus Purnomo Adi Putra and Ni Gusti Putu Wirawati, “Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan,” *E-Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2015): 252–68.

<sup>8</sup> Abdul Hamid And Ilyas Lamuda, “Evaluation Of Financial Performance Through Approach To Value For Money Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money,” *Gorontalo Accounting Journal* 2, no. 1 (2019).

<sup>9</sup> Dinas Pertanian Kota Mataram, “Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA),” 2019.

semakin menyempit dan membutuhkan strategi yang baik dalam menanganinya. Selain itu juga pendapatan yang diperoleh Dinas Pertanian dari retribusi hanya berasal dari rumah potong hewan meski demikian pendapatan ini terus meningkat, tahun 2018 Dinas Pertanian kota Mataram memperoleh realisasi pendapatan dari retribusi sebesar Rp. 319.026.000,00-.<sup>10</sup>

Pemerintahan daerah merupakan pihak yang diberikan tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah tentu wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah agar dapat dinilai kinerjanya ketika menjalankan tugas.<sup>11</sup> Dalam hal ini tentu diperlukan suatu model yang mampu digunakan untuk menilai perkembangan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan evaluasi pada laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pertanian tahun 2019 dalam kerangka konsep *value for money*.

Penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan literatur dan kajian dari akuntansi sektor publik khususnya yang menerapkan pendekatan *value for money*, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi institusi pemerintahan terutama Dinas Pertanian Kota Mataram untuk dijadikan acuan dalam merealisasikan *good governance* yaitu institusi yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Penganggaran Berbasis Kinerja**

Sistem anggaran dalam konsep *Value for money* atau anggaran berbasis kinerja adalah suatu bentuk sistem penganggaran yang mengupayakan pada capaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>12</sup> Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sistem kinerja diukur atau disetujui oleh pihak tertentu dengan pencapaian yang dihasilkan serta menghubungkannya dengan visi yang ada di dalam organisasi.

---

<sup>10</sup> Dinas Pertanian Kota Mataram.

<sup>11</sup> Hamid And Lamuda, "Evaluation Of Financial Performance Through Approach To Value For Money Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money."

<sup>12</sup> Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, juga mengungkapkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja dan dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*), prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*), dan prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Oleh karena itu dalam penganggaran berbasis kinerja ini memungkinkan dominasi pemerintah atau sektor publik dapat lebih diawasi melalui pelaporan kinerja dan evaluasi eksternal.

Sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, dan Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, mengungkapkan bahwa Laporan kinerja merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintahan yang dilaporkan pada akhir tahun berlaku sebagai laporan pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.<sup>13</sup> Oleh karena itu evaluasi terhadap pelaporan kinerja institusi pemerintahan sangat mungkin untuk dilakukan oleh pihak-pihak eksternal.

### **Indikator Dan Pengukuran Kinerja**

Agar mampu mengukur suatu kinerja yang ada di dalam organisasi sektor publik atau pemerintahan sangat perlu untuk menentukan indikator yang tepat terhadap kinerja yang akan dicapai. Indikator dalam pengukuran kinerja adalah suatu bentuk pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan pertimbangan indikator kinerja seperti masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).<sup>14</sup> Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo dimana istilah indikator kinerja ini berfokus pada penilaian kinerja yang dilakukan secara tidak langsung dan merupakan indikasi-indikasi dalam kinerja.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Inspektorat Kota Mataram, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Tahun 2019 Inspektorat Kota Mataram 2020," 2020.

<sup>14</sup> Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

Pengukuran kinerja telah dituangkan pada dokumen penganggaran dan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh organisasi pemerintah. Pengukuran dalam kinerja kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan, membandingkan antara target yang telah disusun dalam bentuk input, output dan outcome yang telah dituliskan dalam dokumen realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Mataram.<sup>16</sup>

### **Konsep *Value for money***

*Value for money* adalah nilai yang sangat dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan, dimana dapat memberikan fokus pada nilai uang yang akan dipergunakan. “Konsep *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap uang” sehingga setiap pengeluaran yang dilakukan dapat memberikan penghargaan terhadap nilai rupiah secara layak dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan.<sup>17</sup> Menurut Mardiasmo konsep *Value for Money* merupakan suatu bentuk pengelolaan organisasi pemerintah yang didasarkan pada 3 elemen utama seperti nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.<sup>18</sup>

Manfaat dari penerapan konsep *value for money* ini pada sebuah organisasi pemerintah seperti peningkatan efektivitas pelayanan publik sehingga tepat sasaran, peningkatan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam input, alokasi belanja akan lebih berfokus pada kepentingan publik, dan peningkatan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.<sup>19</sup>

Sejalan dengan itu organisasi pemerintah perlu menetapkan capaian kinerja yang perlu dipenuhi, Indikator kinerja yang digunakan dalam *value for money* difokuskan pada nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan yang

---

<sup>16</sup> Dinas Pertanian and Kota Mataram, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L k i p) Dinas Pertanian Kota Mataram Tahun 2019,” 2020.

<sup>17</sup> Nico Andrianto, “Good E-Government : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government,” 2007, 272, <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-7919>.

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

<sup>19</sup> Mardiasmo.

dikenal sebagai 3E.<sup>20</sup> Menurut Kariyoto Indikator efektivitas pada *value for money* memiliki orientasi pada hasil yang mengarah pada kualitas, sedangkan indikator nilai ekonomis dan efisiensi memiliki orientasi pada proses yang bersifat statistik.<sup>21</sup> Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator dalam *value for money*:

a). Ekonomis

Ekonomis adalah pendekatan yang cenderung hemat dalam melakukan kegiatan, program, dan alokasi sumber daya yang dimiliki, dimana hal ini berhubungan dengan output dan input. Oleh karena itu, suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila mampu mengurangi biaya yang tidak diperlukan.<sup>22</sup> Secara angka matematis, nilai ekonomis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

b). Efisiensi

Efisiensi adalah pendekatan yang memiliki daya guna dalam penggunaan sumber daya agar memberikan hasil yang maksimal. Pada dasarnya definisi nilai ekonomis dan efisiensi itu sama, hal ini dikarenakan kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya dalam kegiatan operasional yang akan dilakukan.<sup>23</sup> Rumus dalam mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

c). Efektifitas

Efektif adalah pendekatan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada organisasi sektor publik. “Efektivitas merupakan kontribusi dari output terhadap capaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan”.<sup>24</sup> Semakin besar kontribusi pada output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif juga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rumus dalam mengukur tingkat efektifitas adalah:

---

<sup>20</sup> Cindy Arifani, Agustinus Salle, and Andika Rante, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura),” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 13, no. 1 (2018): 68–82.

<sup>21</sup> Kariyoto, “IMPLEMENTASI VALUE FOR MONEY, INPUT OUTPUT OUTCOMEDAN BEST VALUESEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK,” *JIBEKA* 11, no. 1 (2017).

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

<sup>23</sup> Mardiasmo.

<sup>24</sup> Mardiasmo.

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan (capaian kinerja)}}{\text{Anggaran Pendapatan (target)}} \times 100\%$$

## METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Harapannya metode ini mampu menggambarkan mengenai fenomena pustaka dalam pengukuran kinerja sektor publik. Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>25</sup>

Pendekatan yang digunakan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang ingin diamati dari subjek itu sendiri. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana memberikan gambaran fenomena dan informasi yang sesuai dengan keadaan dilapangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan data dan informasi berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang telah diperoleh.

Analisis deskriptif kualitatif yang ada pada penelitian digunakan dalam melakukan pengembangan teori yang ada melalui data-data yang diperoleh dilapangan. Waktu penelitian yang digunakan hingga penyusunan penelitian ini selesai, sedangkan tempat penelitian berada di Universitas Mataram dimana penulis mengempuh studi, memperoleh data informasi, dan referensi pustaka.

Sumber data menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, akan tetapi data yang diperoleh dari sumber-sumber luar. Data penelitian ini diambil dari hasil observasi dan dokumentasi yang memiliki hubungan dengan fokus pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi dari pengamatan kemudian dicatat dan diselidiki untuk hal-hal yang diperlukan pada penelitian ini. Dokumen tersebut diperoleh pada pengumpulan data-data yang berkaitan dengan lembaga untuk menunjang penelitian dari website resmi pemerintah. dokumen-dokumen tersebut dapat berupa rekaman, gambar, catatan atau foto dan hasil observasi yang memiliki hubungan dengan fokus

---

<sup>25</sup> Hamid Darmadi, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial : Konsep Dasar Dan Implementasi / Hamid Darmadi | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Bandung: Alfabeta, 2013), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=910662>.



penelitian. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan selanjutnya dianalisis untuk memberikan gambaran secara faktual, akurat, dan sistematis tentang fakta dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

## HASIL PENELITIAN

### **Analisis Kinerja Pada Dinas Pertanian Dengan Pendekatan *Value For Money***

Apabila dilihat dari rumusan masalah serta tujuan yang telah digambarkan dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan pengukuran laporan kinerja dinas pertanian menggunakan pendekatan *value for money* dari nilai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Dimana ketiga hal tersebut sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dalam nilai ekonomis dibahas tentang masukan, dalam nilai efisiensi membahas masukan serta keluaran, dan nilai efektifitas tentang keluaran serta dampak dari suatu program kegiatan. Sehingga disini penulis akan coba menggambarkan hasil dari laporan kinerja yang telah disampaikan oleh Dinas Pertanian tahun 2019.

Sejalan dengan yang diamanatkan pada PP RI No 29 Tahun 2014, Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014. Dinas Pertanian Kota Mataram telah menyusun suatu media pertanggungjawaban kinerja yang tertuang dalam LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) agar dapat mengetahui berapa banyak yang telah ditargetkan, direalisasikan, dan alasan kurang serta lebihnya dikarenakan oleh apa. Oleh karena itu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kota Mataram berdasarkan LKIP tahun 2019 telah menunjukkan hasil yang baik jika ditinjau dari segi *value for money*.

### **Analisis Laporan Dinas Pertanian Dari Aspek Ekonomis**

Berdasarkan laporan kinerja yang dipublikasi pada LKIP Dinas Pertanian pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Penganggaran Kinerja Tahun 2019

NO	URAIAN (RP)	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja tidak langsung	9.924.322.482	9.359.640.594	94,31
2.	Belanja langsung	7.664.456.110	7.485.904.060,18	97,67
	- Belanja pegawai	406.145.000	403.585.000	94,51
	- Belanja barang dan jasa	5.519.981.610	5.406.623.953	97,94
	- Belanja modal	1.738.329.500	1.675.557.107,18	96,39
3.	Jumlah	<b>17.588.778.592</b>	<b>16.845.544.654,18</b>	95,77

Berdasarkan Renja (Rencana Kerja) Dinas Pertanian kota Mataram tahun 2019 dalam anggaran yang diusulkan pada belanja langsung sebesar Rp. 7.437.200.000,- akan tetapi yang diperoleh sebesar Rp. 7.664.456.110,- disinyalir hal ini disebabkan oleh adanya anggaran dari Dana Alokasi Khusus serta Pokir yang diterima (LKIP, 2019). Lebih lanjut pada Total Belanja yang telah dianggarkan sebesar Rp. 17.588.778.592,- akan tetapi yang terealisasi Rp. 16.845.544.654,18,- (95,77%). Kemudian pada Belanja Langsung telah dianggarkan sebesar Rp. 7.664.456.110,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.485.904.060,18,- (97,67%) sehingga dari capaian sasaran sebesar 97,67%, terjadi efisiensi yang dilakukan pada belanja langsung yaitu Rp. 178.552.050,- (2,4%). Lebih lanjut belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar 9.924.322.482 - terealisasi 9.359.640.594 (94,31%) terjadi efisiensi yang ada pada belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 564.681.888,- (5,7%). Sehingga dari belanja langsung dan belanja tidak langsung telah menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 743.233.938,- (4,3%).

Oleh karena itu dari penjabaran diatas pengukuran nilai ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{16.845.544.654,18}{17.588.778.592} \times 100\% = 95,77 \%$$

Dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Mataram telah ekonomis dalam mengelola anggarannya sesuai dengan teori dimana mengoptimalkan penyerapan sumber daya dengan alokasi yang telah direncanakan pada anggaran. Kinerja pada pemerintahan daerah dapat dikatakan ekonomis apabila telah mampu meminimalisir input yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan serta

tidak produktif.<sup>26</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian Kota Mataram telah meminimalisir pengeluaran hingga 95,77%.

### Analisis Laporan Dinas Pertanian Ditinjau Dari Aspek Efisiensi

Tabel 2 Realisasi Pada Penggunaan Anggaran Program Kegiatan

NO	Program kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	REALISASI	
				Keu (%)	Fisik (%)
1	Pelayanan adm. Perkantoran	1.248.388.110	1.183.329.813	94,78	100
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	380.100.000	377.828.000	99,40	100
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	17.700.000	13.700.000	77,40	100
4	Peningkatan ketahanan pangan	2.122.159.000	2.110.295.226	99,44	100
5	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	173.125.000	173.101.305	99,98	100
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	641.915.000	639.024.000	99,54	100
7	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.774.227.000	1.705.022.571	96,09	100
8	Peningkatan hasil produksi hasil peternakan	408.180.000	396.866.119	97,22	100
9	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	100.000.000	99.824.100	99,82	100
10	Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	798.662.000	782.912.881	98,02	100
	Jumlah	7.664.456.110	7.481.904.015	97,61	100

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Mataram Tahun 2019

<sup>26</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

Dapat dilihat tingkat efisiensi dari Dinas Pertanian Kota Mataram antara output dengan input berupa program yang telah direalisasikan menurut laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) yang telah dipublikasi tahun 2019. Dimana tingkat efisiensi yang diperoleh dari kegiatan keuangan sebesar 97,61 % dan kegiatan fisik 100%. Sedangkan input berasal dari jumlah dana yang dianggarkan untuk program sebesar 7.664.456.110 dan output berasal dari jumlah dana yang direalisasikan sebesar 7.481.904.015.

$$\text{Efisiensi} = \frac{7.481.904.015}{7.664.456.110} \times 100\% = 97,61\%$$

Efisiensi sangat berhubungan dengan masukan serta keluaran dari barang dan jasa yang dilakukan oleh organisasi dan digunakan untuk mencapai output tertentu.<sup>27</sup> Dalam hal ini dinas pertanian telah melakukan efisiensi dari pengeluaran yang dilakukan sebesar 97,61%.

#### Analisis Laporan Dinas Pertanian Ditinjau Dari Aspek efektivitas

Tabel 3 Ringkasan Rencana kerja anggaran pada perubahan satuan kerja perangkat daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		TRIWULAN	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(Rp)	(%)
1	Pendapatan	257.000.000,00	277.000.000,00	20.000.000,00	7,78
2	Pendapatan asli daerah	257.000.000,00	277.000.000,00	20.000.000,00	7,78
3	Hasil retribusi daerah	257.000.000,0	277.000.000,00	20.000.000,00	7,78
4	Belanja	16.455.635.719,00	17.588.778.592,00	1.133.142.873,00	6,89
5	Belanja tidak langsung	9.585.429.609,00	9.924.322.482,00	338.892.873,00	3,54
6	Belanja pegawai	9.585.429.609,00	9.924.322.482,00	338.892.873,00	3,54
7	Belanja langsung	6.870.206.110,00	7.664.456.110,00	794.250.000,00	11,56
8	Belanja pegawai	396.820.000,00	406.145.000,00	9.325.000,00	2,35
9	Belanja barang dan jasa	4.795.719.110,00	5.519.981.610,00	724.262.500,00	15,10

<sup>27</sup> Mardiasmo.

10	Belanja modal	1.677.667.000,00	1.738.329.500,00	60.662.500,00	3,62
		(16.198.635.719,00)	(17.311.778.592,00)	(1.113.142.873,00	6,87
				)	

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2019

Tabel 4 Target serta Realisasi Keuangan pada Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% DARI ANGGARAN
1	Pendapatan	257.000.000,00	257.000.000,00	319.026.000,00	124,13
2	PENDAPATAN	257.000.000,00	257.000.000,00	319.026.000,00	124,13
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257.000.000,00	257.000.000,00	319.026.000,00	124,13
4	Pendapatan Retribusi Daerah	257.000.000,00	257.000.000,00	319.026.000,00	124,13

Sumber: CALK dinas pertanian per 31 desember 2018

Dari data yang diperoleh diatas peneliti menemukan pendapatan Sebelum perubahan sebesar 257.000.000,00 dan setelah perubahan sebesar 277.000.000 terealisasi sebesar 319.026.000,00. Hasilnya adalah terjadi peningkatan sebesar 62.026.000 jika mengacu pada pendapatan sebelum perubahan, dan 42.026.000 setelah perubahan. Efektivitas setelah perubahan anggaran sebesar 86,82% ,Sehingga dapat disimpulkan dari peningkatan realisasi pendapatan telah efektif.

$$\text{Efektifitas} = \frac{277.000.000}{319.026.000} \times 100\% = 86,82\%$$

Efektivitas merupakan tingkat dari pencapaian hasil pada program dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas merupakan hubungan antara output serta tujuan yang dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat keluaran, kebijakan serta prosedur organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup> Dari output

<sup>28</sup> Mardiasmo.

dan tujuan yang telah direalisasikan dapat diketahui tingkat efektivitas dinas pertanian tahun 2019 sebesar 86,82%.

### SIMPULAN

Dinas Pertanian Kota Mataram yang bergerak dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dibidang pertanian telah menunjukkan hasil yang baik jika ditinjau dari segi *value for money*. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan *value for money* dari aktivitas program yang telah direalisasikan Dinas Pertanian Kota Mataram tahun 2019 mengalami peningkatan pada tingkat ekonomis sebesar 95,77%, efisiensi sebesar 97,61%, dan efektifitas sebesar 86,82% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Winia, Kariyoto, dan Taufik yang menyatakan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada variabel tingkat ekonomis, efisiensi dan variabel efektivitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas telah meningkat dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja *value for money* dan mengalami perbedaan yang cukup signifikan dengan tahun sebelumnya.

### SARAN

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Pertanian Kota Mataram tahun 2019 telah berhasil melakukan pendekatan berbasis *value for money*. Sehingga peneliti berharap keseimbangan antara nilai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas ini dapat terjaga dengan baik. Selain itu dalam Dinas Pertanian Kota Mataram masih adanya perubahan dalam perencanaan penetapan target yang dilakukan, dan masih perlu diperhitungkan secara matang dalam aspek efektivitas. Adapun saran yang diharapkan kepada peneliti selanjutnya adalah dapat menambahkan rasio keuangan yang lain, dapat menggambarkan data secara kuantitatif dan kualitatif dengan cakupan yang lebih luas dan dapat melakukan pendekatan *value for money* dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, ekonomi dan situasi politik yang berkembang.

## REFERENSI

- Andrianto, Nico. "Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government," 2007, 272. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-7919>.
- Arifani, Cindy, Agustinus Salle, and Andika Rante. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura)." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 13, no. 1 (2018): 68–82.
- Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Darmadi, Hamid. *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial : Konsep Dasar Dan Implementasi / Hamid Darmadi | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Bandung: Alfabeta, 2013. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=910662>.
- Dinas Pertanian Kota Mataram. "Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)," 2019.
- Geoffrey Q.P.S dkk. "'Wealth Generation Through Value.'" *Journal of Value Management* 8, no. 1 (2002). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997> <http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.
- Hamid, Abdul, and Ilyas Lamuda. "Evaluation Of Financial Performance Through Approach To Value For Money Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money." *Gorontalo Accounting Journal* 2, no. 1 (2019).
- Jaya, M, I Handajani, and L Sakti. "Anteseden Intensi Menggunakan Whistleblowing System." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 3 (2022): 511–23. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2>.
- Kariyoto. "Implementasi Value For Money, Input Output Outcomedan Best Value sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik." *JIBEKA* 11, no. 1 (2017).
- Kurrohman, Taufik. "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5, no. 1 (2013): 1–11.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STI YKPN, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Mataram, Inspektorat Kota. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Tahun 2019 Inspektorat Kota Mataram 2020," 2020.
- Pertanian, Dinas, and Kota Mataram. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kota Mataram Tahun 2019," 2020.
- Putra, Agus Purnomo Adi, and Ni Gusti Putu Wirawati. "Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan." *E-Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2015): 252–68.

Sanjaya, Dika Husni, and Maswar Patuh Priyadi. "Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset* 8 No.12 (2019): 1-16.